

**WALI NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SUNNI
DAN SYI'AH**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
ALAUDDIN
M A K A S S A R
NAHARIA
NIM: 10400111037

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naharia
NIM : 10400111037
Tempat/tgl.Lahir : Pambusuang / 15 Juni 1992
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Sultan Alauddin III No 105
Judul : Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31-Maret-2016

Penyusun,

Naharia

NIM: 10400111037

PENGESAHAN SKRIPSI

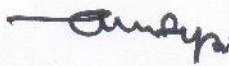
Skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Penemuan Terbimbing (*Discovery Learning*) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V SD Inpres No 173 Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” yang disusun oleh saudari Nasriana, NIM: 20700112047 mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 22 Dzulkaidah 1437 H, dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Matematika, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 25 Agustus 2016 M
22 Dzulkaidah 1437 H

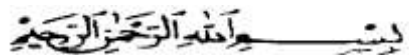
DEWAN PENGUJI (SK. Dekan No. 1866 Tahun 2016)

KETUA	: Dra. Andi Halimah, M.Pd.	(.....)
SEKERTARIS	: Jamilah, S.Si., M.Si.	(.....)
MUNAQISY I	: Sri Sulasteri, S.Si., M.Si.	(.....)
MUNAQISY II	: Andi Ika Prasasti Abrar, S.Si., M.Pd.	(.....)
PEMBIMBING I	: Drs. Thamrin Tayeb, M.Si.	(.....)
PEMBIMBING II	: Nur Khalisah Laticonsina, S.Ag., M.Pd.	(.....)

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP. 19730120 200312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “**Wali Nikah Bedah Agama dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi’ah**” Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moral maupun materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan Ayahanda **Bakri** dan Ibunda **Nurmadian**. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan kepada Almarhumah Ibunda

tersayang, yang sudah merawat saya sampai dewasa dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. **Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag.**, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya.
3. **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.** selaku ketua dan **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Abdi Wijaya, M.Ag.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang berguna.
6. Terima kasih untuk **Robbi Salam** yang selalu ada, memberikan semangat, memotivasi dan selalu membantu setiap saat.
7. Terima kasih Sahabat-sahabat seperjuanganku **Humaerah, Afdalia dan Hasbi.**
8. Seluruh Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Angkatan 2011 yang tidak sempat di sebutkan satu-persatu yang setia membantu dalam suka dan duka.
9. Terima Kasih kepada semua teman-teman KKN UIN Angkatan 50 Desa Borimasunggu, Kec. Maros baru, Kab. Maros yang senantiasa menemani dan melewati suka duka bersama-sama.
10. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak sempat disebutkan

satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada kalian diucapkan banyak terima kasih.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Wassalam

Makassar, 31-Maret-2016

Penulis,

Naharia

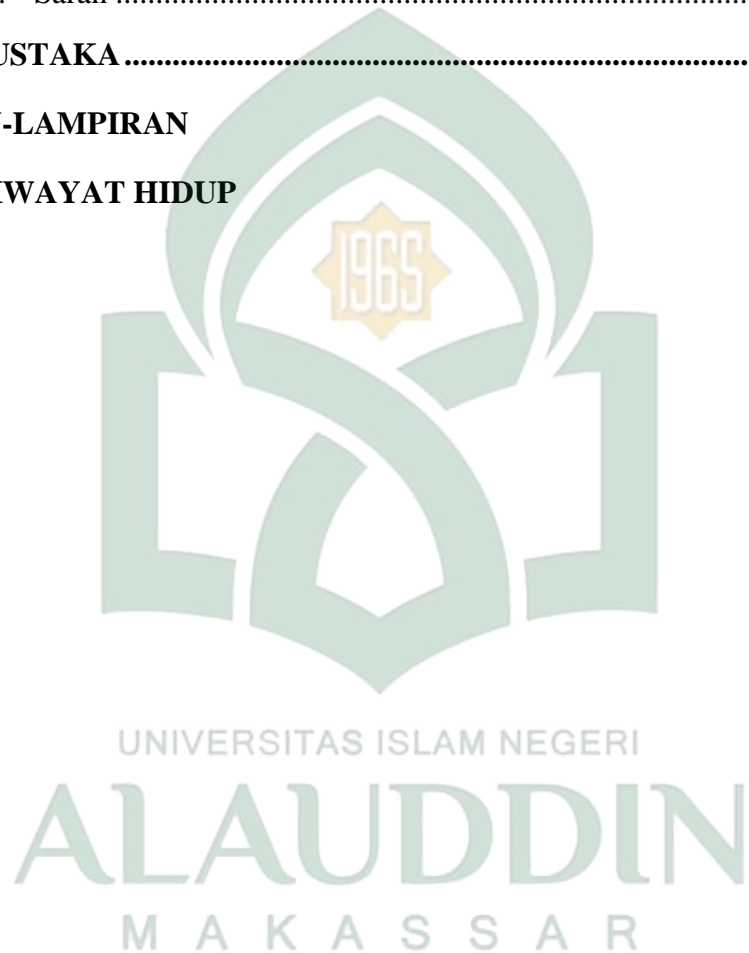
NIM: 10400111037



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II SISTEM PERWALIAN DALAM PANDANGAN SUNNI.....	17
A. Pengertian Wali Nikah	11
B. Susunan Wali Nikah.....	22
C. Syarat-syarat Wali Nikah.....	25
D. Fungsi dan Kedudukan Wali Nikah.....	26
E. Macam-macam Wali Nikah.....	30
BAB III SISTEM PERWALIAN PANDANGAN SYIA'AH	34
A. Pengertian Wali Nikah	34
B. Syarat-syarat Wali Nikah	35
C. Kedudukan Wali Nikah.....	45
D. Macam-macam Wali Nikah.....	46
BAB IV BEDA AGAMA DALAM PERWALIAN SUNNI DAN SYI'AH	51
A. Perwalian Beda Agama.....	51
1. Wanita Muslimah sedang Wali yang menikahkannya Kafir.....	52
2. Wanita non Muslim sedang Wali yang menikahkannya Muslim.....	53

B. Implementasi Pernikahan dengan Wali Beda Agama dalam Kehidupan kontemporer.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

NAMA :Naharia
NIM :10400111037
JUDUL :Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi'ah

Skripsi ini membahas tentang Wali nikah beda agama dalam perspektif mazhab sunni dan syi'ah, sub permasalahan: 1) Apa yang dimaksud dengan wali nikah dalam hukum pernikahan? 2) Bagaimana sistem beda agama dalam perwalian menurut aliran sunni? 3) Bagaimana sistem perwalian beda agama dalam aliran syi'ah? 4) Bagaimana implementasi pernikahan dengan wali beda agama pada kehidupan kontemporer.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

Penelitian menunjukkan bahwa: 1) wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. 2) Menurut Ulama Sunni mengatakan bahwa Wali tidak berhak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim atau orang Islam tidak boleh menjadi wali perempuan kafir. 3) Sistem perwalian beda agama dalam aliran Syi'ah dengan melihat pendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab, berarti membolehkan dari sisi perwalian beda agama. 4) Implementasi pernikahan dengan wali beda agama pada kehidupan kontemporer semakin memperlihatkan keunikannya dengan beragam penafsiran yang terjadi dan membuahkan konklusi berbeda.

Adapun implikasi dalam skripsi ini adalah: Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertidak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal. Disamping itu, ikatan pernikahan juga diharuskan santun menyantuni, kasih mengasih sehingga terwujud sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Karena itu, pernikahan harus dilaksanakan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah adanya seorang wali, oleh sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Sebagaimana diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar qobul adalah pihak laki-laki. Pada bagian inilah, peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.¹

Secara umum, wali dapat artikan sebagai rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.98.

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Perkawinan merupakan kebutuhan biologis dan psikologis manusia sejak zaman dahulu. Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pernikahan dinyatakan sah apa bila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.²

Perwalian beda agama banyak terjadi, sehingga tidak jarang hal ini membuat sulit kedua pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Belum lagi jika seorang non muslimah masuk kedalam agama Islam, sehingga saat pernikahan terjadi kesulitan khususnya tentang kedudukan wali tersebut. Sebaliknya ketika seorang non muslim masuk kedalam agama Islam sementara putrinya tetap pada agamanya. Maka, hal itupun menjadi masalah dalam perkawinan.

Perwalian beda agama banyak terjadi di kehidupan di sekitar kita, sehingga tidak jarang hal ini membuat sulit kedua pasangan untuk melakukan pernikahan. Belum lagi jika seorang non muslimah masuk dalam agama Islam, sehingga dalam pernikahan terjadi kesulitan khususnya tentang wali nikah beda agama tersebut. Sebaliknya ketika seorang bapak non muslim masuk kedalam agama Islam tetap pada agamanya.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.87.

Menurut aliran Syi'ah pernikahan merupakan antara orang muslim dengan orang musrik dan sebagian para ulama mengharamkan. Alasan yang cukup sederhana bahwa mereka juga akan mempunyai banyak perbedaan, baik dilihat dari segi agama, pemikiran, kebudayaan, peradaban dan yang paling urgen adalah cara hidup mereka sangat berbeda sekali dengan orang muslim, maka sangatlah tidak mungkin bagi seorang muslim untuk menikahi orang musyrik.

Pada sisi agama Islam, masalah pernikahan antara orang muslim dengan orang non muslim ini sebenarnya terbagi dua kasus. Pertama, pernikahan antara laki-laki non muslim baik laki-laki musyrik ataupun ahli kitab dengan wanita muslim. Kedua, pernikahan antara laki laki muslim dengan wanita non muslim.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu: Bagaimana wali nikah beda agama dalam perspektif mazhab Sunni dan Syi'ah?

Dari permasalahan pokok tersebut di atas, maka timbul beberapa sub permasalahan:

1. Apa yang dimaksud dengan wali nikah dalam hukum pernikahan?
2. Bagaimana sistem perwalian beda agama menurut aliran sunni?
3. Bagaimana sistem perwalian beda agama menurut aliran syi'ah?

³Abul Ala al-Maududi.Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Daru Ulum Fress, 1983). h. 14.

4. Bagaimana implementasi pernikahan dengan wali beda agama pada kehidupan kontemporer?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Pengertian Pernikahan

Menurut kamus bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.⁴ Dalam kamus lain disebutkan bahwa nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi).⁵

Lebih lanjut Muhammad Yunus mengemukakan pengertian nikah sebagai berikut: Perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari'at. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang dimaksud akad nikah ialah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dengan *qobul* dari pihak calon suami atau wakilnya.⁶

2. Wali Nikah

Kata wali menurut bahasa berasal dari kata *al-wali* yang membentuk jamaknya *auliya* yang berarti pencinta, saudara atau penolong.⁷ Wali menurut istilah berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Kata perwalian berasal dari kata wali yang mendapat

⁴WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet Ke-6; Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.453

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.614

⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung 1979)h.1

⁷Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid* (Bairut: Dar al-Musyrik, 1975), h.919

imbuhan per-an. Kata perwalian mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.⁸ Adapun pengertian wali adalah orang yang diserahi amanah untuk mengurus anak atau yatim sampai menginjak usia dewasa, termasuk dalam wali pernikahan. Dengan demikian yang menjadi proses penelitian adalah wali nikah beda agama dalam perspektif mazhab sunni dan syi'ah.

D. Kajian Pustaka

Beberapa buku dan hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Ahmad Abidin yang berjudul “Status Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”⁹. Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayahnya dan menurut agama Islam terhadap praktis wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandung. Dalam skripsi ini Ahmad Abidin menggunakan pendekatan sehingga kajian skripsinya hanya sebatas hukum dari wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandungnya tanpa menguraikan solusi dan faktor yang mempengaruhi wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandungnya. Berbeda dari skripsi di atas, skripsi yang disusun ini lebih mengedepankan pada proses wali nikah beda agama atau keyakinan dalam pernikahan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1007

⁹Ahmad Abidin, “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Skripsi lain yang mengangkat tema tentang wali yaitu: “Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Wali” karya Mohammad Juri. Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan antara pandangan Mazhab Sunni, undang-undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah yang dilangsungkan tanpa wali. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan ushul fiqih dengan menekankan substansi hukum dan metodologi ijtihad dalam merumuskan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Hasil dari penelitian tersebut adalah perihal seorang yang menikahkan dirinya, dari kalangan sunni terpecah menjadi dua kelompok ada yang menganggap sah dan ada juga yang menganggap tidak sah. Pandangan Kompilasi Hukum Islam sama dengan pandangan sunni perihal pemberian hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah seorang calon mempelai perempuannya.¹⁰

Berdasarkan kajian pustaka yang penyusun temukan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai wali nikah beda agama, sehingga penyusun tertarik meneliti dan mengkaji judul tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hal yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satunya metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.¹¹

¹⁰Mohammad Juri, “Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

¹¹Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

Metode penulisan skripsi yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹² Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹³

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴

b. Sumber sekunder

¹²Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*(Bandung: Alfabeta, 2006), h. 253.

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan, untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan literature yang dipandang mewakili (*representative*) dan berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Study Dokumenter, yaitu menelaah bahan-bahan yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan *hadhanah* serta putusan hakim yang menyangkut *hadhanah*.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data.
- b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.¹⁶

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. h. 253.

¹⁶Abd. Kadir Ahmad, "Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data". Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012).h. 8.

- d. Reduksi data yaitu, peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- e. Display data yaitu, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- f. Verifikasi data yaitu, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wali nikah dalam hukum pernikahan
2. Untuk mengetahui sistem perwalian beda agama dalam pernikahan menurut aliran Sunni dan Syi'ah
3. Untuk mengetahui implementasi pernikahan dengan wali beda agama dalam kehidupan kontemporer.

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para intelektual sehingga semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam penelitian yang relevan.



BAB II

SISTEM PERWALIAN DALAM PANDANGAN SUNNI

A. *Pengertian Wali Nikah*

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* dan jamaknya adalah *al-awaliya* kata *al-wali* merupakan kata dalam bentuk Isim Fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.¹

Sedangkan *Al-wilayah* menurut terminologi fuqaha dapat difahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurus atau mengurus atau mengungsai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut wali.² Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.³

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai

¹Abdul Hasan Rauf, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu* (Cet ke-IV; Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006).

²Musthofa al-khin, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002), h.622.

³Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: synermat, 2003), h.7.

dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada juga yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap mausia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁴

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan.⁵

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan atau diwakilkan dengan walinya.⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai mengurus kewajiban anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong.⁷

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h.7.

⁵Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo, Topik-topik Pemikiran Aktua, Diskusi, Pengajian, Cerama, Khutbah dan Kuliah Subuh* (Qolbun Salim, 2006), h.86.

⁶Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.69.

⁷Frista Armanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lintas Media), h.347.

Dalam masalah perwalian, dikenal juga istilah lembaga perwalian. Lembaga perwalian ini dalam situasi dan kondisi tertentu dapat juga bertindak sebagai wali.

Lembaga perwalian adalah:

Lembaga hukum yang berfungsi sebagai pengganti lembaga kekuasaan orangtua terhadap anak atau anak-anak kalau kekuasaan anak-anak yang bersangkutan telah berakhir atau dipecat, dengan maksud agar tidak terjadi kekosongan (*vacum*) dalam kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang masih membutuhkannya.⁸

Jadi wali merupakan pihak yang mengurus atau melindungi anak dengan segala persoalannya. Apabila orang tua atau wali yang lainnya tidak dapat melakukan fungsinya sebagai wali maka lembaga perwalianlah yang akan menggantikan fungsi perwalian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak yang menurut hukum belum dewasa harus berada di bawah naungan walinya.

Secara garis besar perwalian dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan.⁹

Dalam al-Qur'an bentuk jamak kata wali yakni *aulyah* antara lain dapat ditemukan dalam beberapa ayat berikut ini, Allah swt berfirman: QS. Ali-Imran/3: 28.

⁸Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab* (Cet Ke-1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.63.

⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.89.

ط
 لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min.”¹⁰

Pada ayat lain Allah swt berfirman: QS. al-Anfal/8 : 3.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ



Terjemahnya:

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.”¹¹

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah atau tidaknya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam pernikahan tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan terhadap pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h 54.

¹¹Departemen Agama RI, Al-QJur'an dan Terjemahnya, h.178.

wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Di samping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.¹²

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip, dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹³ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2007), h.15.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.17.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: 1985), h.222.

B. *Urutan Wali Nikah*

Perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan harus mempunyai seorang wali (sebagai pemegang kuasa), sebelum diserahkan atau dinikahkan kepada seorang laki-laki, lain halnya dengan seorang suami yang tidak membutuhkan wali. Seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah kerabat dari pengantin perempuan secara berurutan dari yang dekat sampai yang jauh, apabila nomor satu sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat maka diganti nomor dua dan seterusnya.¹⁵

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut urutan yang akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:¹⁶

- a. Bapaknya.
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
- i. Hakim.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet ke-IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.80.

¹⁶H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), h.383.

Menurut jumhur ulama, diantaranya Malik, dan Syafi'i bahwa yang berhak menjadi wali adalah *ashabah* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kecuali hakim.¹⁷ Sedangkan menurut ulama Syafi'i, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Kalau ayahnya telah meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat ditentukan syari'at misalnya hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbahnya dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah buyutnya (ayah dari kakek), demikian seterusnya sampai ke atas.

Kalau yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu). Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya adalah saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah.

Kalau wali yang diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan diatas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah kandungnya. Sedangkan urutan berikutnya, yang

¹⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*. h.139.

berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah).dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.¹⁸

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki ayah kandung.
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- k. Anak laki-laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

¹⁸Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.69.

- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.¹⁹

Sedangkan menurut ulama Maliki, urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Ayah (*al-Ab*).
- b. Al-washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (*al-Ab*) untuk menjadi wali nikah.
- c. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.
- d. Cucu laki-laki.
- e. Saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Saudara laki-laki yang seayah.
- g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung.
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah.
- i. Kakek yang seayah.
- j. Paman yang sekandung dengan ayah.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.
- m. Ayah dari kakek.²⁰

Adapun urutan wali dalam mazhab Hambali, sebagai berikut:

¹⁹Muhammad Syarbini, *Al-Iqna' Fi Hilli al-Alfad Abi Saju* (Bandung: Daar al-Ikhyat al-Kutubiyah al-Alamiyyah, t.th., Juz II), h.246.

²⁰Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, *Ashal al-Madarik, jilid I* (Beirut: Daar al-Fikr, 1996), h.366.

- a. Bapak (*al-Ab*).
- b. *Washi* dari bapak setelah meninggalnya.
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu.

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir. Sedangkan wali aqrah dari nasab menurut Imam Hambali, adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain sebagai berikut:

- a. Bapak.
- b. Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas.
- c. Anak laki-laki.
- d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai derajat ke bawah.
- e. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung).
- f. Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah).
- g. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah kandung).
- h. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah.
- i. Paman-pamannya kakek.
- j. Anak-anak pamannya kakek.

Ulama Hanafi, berpandangan bahwa status wali hanyalah status perkawinan, bukan rukun perkawinan. Oleh karena itu, mereka meringkas rukun nikah hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Rasionalitas tentang wali didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Status wali hanya berlaku pada orang yang masih kecil (belum dewasa) baik laki-laki maupun perempuan, dan orang gila perempuan atau

laki-laki mekipun dewasa. meskipun status wali menurut Ulama Hanafi, seperti itu, tetapi Ulama Hanafi, memiliki urutan perwalian sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah.
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas.
- c. Saudara laki-laki yang sekandung.
- d. Saudara laki-laki yang seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah.
- g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.
- i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut

diatas.bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Demikian pula hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km) demikian menurut pendapat Jumhur ulama.²¹

C. Syarat-Syarat Wali Nikah

Orang yang akan menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang akan telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum, maka perwaliannya dinyatakan tidak sah. Karena itu persyaratan menjadi wali harus terpenuhi. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali tetapi harus memenuhi syarat-syarat:²²

- a. Islam, orang kafir tidak sah menjadi wali.
- b. Baligh, anak-anak tidak sah menjadi wali.
- c. Berakal, orang gila tidak sah menjadi wali.
- d. Laki-laki, perempuan tidak sah menjadi wali.
- e. Adil, orang fasik tidak sah menjadi wali.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.78.

²²Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Ed I (Jakarta: Kencana, 2003), h.169.

f. Tidak dalam sedang ihram atau umrah.²³

Pada prinsipnya pendapat-pendapat tersebut (mazhab sunni) tidak terdapat perbedaan mendasar. Dari berbagai pendapat tersebut dapatlah diambil suatu pengertian bahwa persyaratan menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Orang yang bertindak sebagai wali nikah haruslah beragama Islam. Ini berarti orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt: QS. Ali-Imran/3 : 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً^ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^ط

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah tempat kembali.”²⁴

Pada ayat lain, Allah swt berfirman: QS. an-Nisa/4 : 144.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا^ط

²³Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.28.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.54.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).”²⁵

Dua ayat tersebut sebagai landasan bahwa umat Islam jika akan menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan muslim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa beragama Islam merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.

2. Baligh

Orang yang menjadi wali nikah disyaratkan dewasa. Anak-anak tidak sah menjadi wali nikah, bahkan dalam persoalan diri maupun harta benda membutuhkan wali. Jadi, anak-anak itu dalam perwalian orang lain, karena itu tidak mungkin menjadi wali. Allah swa berfirman: QS. an-Nisa/4 : 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁶

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.102.

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.78.

3. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali haruslah orang yang berakal sehat. Jika misalnya suatu saat wali yang berakal sehat itu ternyata sudah tidak waras lagi (gila), maka status kewaliannya tersebut telah hilang dan dengan sendirinya menjadi batal dalam perwalian.²⁷

Orang yang sehat akalnya, atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi, salah satu syarat menjadi wali adalah berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).²⁸

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa syarat utama yang harus pada wali adalah islam, dewasa dan laki-laki. Tentang persyaratan lain seperti berakal dan adil dapat diambil pengertian baligh menunjukkan bahwa orang itu berakal, dan muslim atau beragama islam menunjukkan bahwa orang tersebut pasti dapat berbuat adil. Dengan demikian tiga persyaratan tersebut pada dasarnya juga mencakup lima persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum Islam.

4. Laki-laki

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh wali adalah laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa salah satu syarat wali adalah laki-laki (perempuan tidak sah menjadi

²⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet Ke-1; Medan: CV. Zahri Trading, 1975), h.225.

²⁸Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.28.

wali).²⁹ Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali harus laki-laki tidak boleh perempuan.

Demikian merupakan pendapat seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan dan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.³⁰

5. Adil

Salah satu syarat lain yang harus dimiliki oleh wali nikah adalah adil. Adil yang dimaksud adalah yang berbuat adil, tidak berbuat fasik. Menurut mushab Syafi'i mensyaratkan wali itu seorang cerdas.³¹ Cerdas yang dimaksud adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. maka orang yang tidak cerdas atau tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan. Ini berarti jika wali ingin berbuat fasik, maka wali tersebut harus digantikan oleh wali yang lain yang memenuhi persyaratan yang telah digantikan.

Persyaratan tersebut diatas memberikan pengertian bahwa syarat utama yang harus ada pada wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, laki-laki, dan adil. Tentang persyaratan lain seperti berakal dan adil dapat diambil dari pengertian baligh karena baligh menunjukkan bahwa orang tersebut pasti dapat berbuat adil. Dengan

²⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.28.

³⁰Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Cet ke-I; Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h.50.

³¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet Ke-1; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.92.

denikian tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencakup lima persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai fiqih atau hukum Islam.³²

D. Fungsi dan Kedudukan Wali Nikah

1. Fungsi Wali

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.³³

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan akil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya dengan walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada memikirkannya, maka diawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal itu juga akan menimpah walinya.³⁴

³²Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

³³Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. h.215.

³⁴Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.90.

Menurut mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali itu sunnah saja hukumnya. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar *ijab* dalam proses akad nikah ialah pihak laki-laki.³⁵

Disamping itu pada perakteknya dimasyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan *ijab* (penawaran), sedang penganting laki-laki yang diperitahkan mengucapkan *qabul* (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (pitrahnya) adalah pemalu (isin-jawa) maka mengucapkan *ijab* itu perlu diwakilkan pada walinya. Hal ini berarti bahwa punfsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan *ijab* dalam akad nikahnya.³⁶

2. Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ulama

³⁵Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. h.215.

³⁶Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.91.

sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.³⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu ayat ataupun hadist yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan selain itu hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqoha masih diperselisihkan kesahihannya kecuali hadis Ibnu Abbas.

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para Ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Jumhur Ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Ima Hanafi)

Mereka berpendapat bahwa ketika wanita itu telah balik dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali.³⁸

Adapun seorang wali nikah harus mempunyai hubungan darah dengan pengantin dan kedudukan itu tidak dapat dilimpahkan kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah secara sah. Namun demikian, seorang wali juga tidak boleh

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.69.

³⁸Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.92

menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan perempuan itu. Logikanya, sementara seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya, sementara seorang perempuan harus sadar akan kedudukannya dalam sebuah susunan keluarga.³⁹

E. *Macam-Macam Wali Nikah*

Dalam komunitas masyarakat umum banyak dari mereka hanya mengetahui orang yang berhak menjadi wali nikah hanyalah ayah saja, pada kenyataannya wali itu bervariasi tergantung bagaimana seorang wali tersebut dekat hubungan nasabnya dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Adapun pembagian wali sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab atau pertalian darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁴⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali itu secara berurutan terbagi sebagai berikut:

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas.
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak).
- c. Saudara laki-laki sebapak.
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.74.

⁴⁰Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahati I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.89

- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung.
- g. Paman (saudara dari bapak) seapak.
- h. Anak laki-laki paman kandung.
- i. anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.⁴¹

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan di bawah ini:

Wali lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang lebih berhak pikun karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam.

Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim

⁴¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h 55.

Wali nasab terbagi dua *pertama*, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir. Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
- b. Sekupu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya.
- c. Calon suami itu mampu membayar mas kawin.
- d. Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.⁴²

Adapun wali *aqrob* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- k. Apabila wali *aqrob*-nya non-Muslim.

⁴²Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.96.

- l. Apabila wali *aqrab*-nya fasik.
- m. Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa.
- n. Apabila wali *aqrab*-nya gila.
- o. Apabila wali *aqrab*-nya bisu atau tuli.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat pemerintah atau lembaga masyarakat yang bisa disebut *Ahlu al-Hilli Wa al-Aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴³

Pengertian wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁴⁴ Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

⁴³A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Cet Ke-II; Bandung: al-Bayan, 1995), h.62.

⁴⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 poin 2.

- d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).

Apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab. Kecuali wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali.⁴⁵

Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari yang berwenang tentang hal itu.⁴⁶ Untuk dapat menggunakan wali hakim, diperlukan alasan-alasan yang kuat bagi calon pengantin perempuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.

⁴⁵Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.97

⁴⁶Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.92.

- d. Wali *aqrab*-nya dipenjara dan tidak bisa diketahui.
- e. Wali *aqrab*-nya *adhal*.
- f. Wali *aqrab*-nya berbelit-belit.
- g. Wali *aqrab*-nya sedang ihram.
- h. Wali *aqrab*-nya sendiri akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mijbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a. Wanita belum baligh.
- b. Kedua belah pihak calon wanita dari laki-laki tidak sekuflu.
- c. Tanpa seizin wali yang akan menikahkan.
- d. Di luar daerah kekuasaannya.

3. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat syahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali muhakkam.⁴⁷

⁴⁷Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.45.

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terdapat disegani luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁴⁸

4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri, laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁴⁹ Allah swt berfirman: QS.an-Nur/24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁴⁸Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010), h.97.

⁴⁹H. M. A. Thami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.97.

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediraan antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampuhkan mereka dengan karunia-nya dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.⁵⁰

Dengan demikian, allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantaranya keduanya.

5. Wali Mujbir

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilian anaknya.⁵¹

Wali mujbir adalah seseorang atau wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridho tidaknya. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atau dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (*abnormal*).⁵²

Mengenai siapakah wali mujbir itu, para imam mazhab ada sedikit perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i wali mujbir adalah bapak kandung, kakek (ayah

⁵⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h 355.

⁵¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kia Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), h.107.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Cet. Ke-II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1982), h.7.

dari bapak kandung) dan seterusnya sampai ke atas. Menurut mazhab Hambali wali mujbir adalah bapak, bukan kakek, washi yang menerima wasiat dari bapak dan hakim. Menurut mazhab Maliki wali mujbir adalah bapak (bukan kakek) dan washi setelah meninggal dunia. Dan menurut mazhab Hanafi semua wali mujbir, seperti dijelaskan bahwa arti wali adalah orang yang berkuasa terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya untuk melaksanakan tugasnya, baik yang berada di bawah perwaliannya itu atau tidak, sebab itu tidak ada wali yang tidak mujbir.⁵³

Adapun menurut keempat mazhab tersebut bahwa bapak atau wali mujbir boleh mengawinkan perempuannya yang masih kecil (yang belum baligh) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya.⁵⁴

Dengan demikian bapak atau wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil dengan ketentuan harus memperhatikan beberapa persyaratan seperti yang telah diuraikan.

Wali nikah lainnya seperti saudara laki-laki, saudara laki-laki sebak, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan menjadi wali, Itu disebut wali yang tidak mujbir. Wali yang tidak mujbir ini boleh menjadi wali nikah dengan ketentuan harus terlebih dahulu meminta izin terhadap orang yang di bawah perwaliannya.⁵⁵

⁵³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h.65.

⁵⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h.68.

⁵⁵Abdullah Siddiq, *Harian Perkawinan Islam* (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Tintamas, 1983), h.60.

BAB III

SISTEM PERWALIAN PANDANGAN SYI'AH

A. *Pengertian Wali Nikah*

Secara bahasa wali merupakan gabungan dari kata wali dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali mempunyai banyak makna antara lain:¹

1. Orang yang menurut hukum (agama/atat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Selain itu juga berarti kekuasaan / otoritas (*as-suthah wal-Qudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawally al-amr* (mengurus / menguasai sesuatu).²

Secara istilah wali adalah sesuatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya. Menurut Wahba al-Zuhayli, wali ialah

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h.1175.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.134.

kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) kepada izin orang lain.³

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat nikah diartikan *adh-adhamm* (bergabung secara mutlak) dan *ikhtilath* (percampuran).⁴

Diantara ayat-ayat yang menunjukkan kata nikah berikut ini, Allah swt berfirman: QS. al-Baqarah/2 : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya:

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan bekas suaminya itu, kecuali ia lebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Kemudian setelah dia bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.

³Wahbah al-Zuhaly, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 1409 H / 1989 M (Beirut: Libanon: Darul Fikr Jil.VII), h.718.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usrah Wa-Ahkamuha Fi- al- Tasyri'i al-Islami*, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, terjemahnya Abdul Mujid Khon (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. Ke-I, h.38.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.37.

Said bin Musayyab, seorang tabi'in dan murid Abu Hurairah dalam menafsirkan, sehingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain, telah mengambil zahir ayat itu saja dan berkata, cukuplah semata-mata akad yang baru. Artinya sesudah itu ia kembali kepada suaminya yang pertama. Tetapi pendapatnya itu ditolak oleh Jumhur, salaf, dan khalaf dengan menyatakan, bahwa disamping akad nikah dengan suami yang kedua disyaratkan keduanya harus bersetubuh dan tidak memadai semata-mata akad saja dengan tidak campur.⁶

Dalam pengertian secara istilah, ulama Syafi'iyah merumuskan pengertian nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya:

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja.”

Apabila kata wali dan nikah digabungkan maka berarti orang yang menjadi wali dalam pernikahan. Menurut Amir Syarifuddin, wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.⁷

Sedangkan menurut Muhammad Jawad Mugniyyah, perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia

⁶Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkan* (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke-I, h.121.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.69.

yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁸

B. Syarat-Syarat Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para fuqoha. Para fuqoha memberikan syarat bagi para wali nikah karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidak sah suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat mejadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagiman dijelaskan di atas.

3. Muslim. Tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt: QS. Ali-Imran/3 : 28.

⁸Muhammad Jawad Mugniayah, *Fiqh Lima mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* h.345

⁹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), h.47.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah tempat kembali.”¹⁰

Pada ayat lain, Allah swt berfirman: QS. al-Maidah/5 : 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”¹¹

4. Orang merdeka.

5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur'alaih*, alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya (pikun) tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatikan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.54.

¹¹Deparemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.118.

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, serta tetap memelihara *murū'ah* atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat dari al-Quthniy:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ". (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. al-Bukhari)

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Utsman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ". (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Utsman bin Affan ra.,: Rasulullah saw., bersabda: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan seseorang.” (HR. Muslim)

Dalam hal persyaratan ini ulama hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.¹²

C. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.78.

rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Memang tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang jelas secara *ibarat al-ash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat di pahami menghendaki adanya wali.¹³

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali dalam firman Allah swt: QS. al-Baqarah/2 : 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا

Terjemahnya:

“Dan bila kamu telah mentalak istri-istimu dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”¹⁴

Kalau sang istri habis masa iddahnya dan tidak ada halangan lain yang ditetapkan agama, maka bekas suami, para wali, atau siapapun tidak boleh melakukan *adhl*, yakni menghalang-halangi mereka, wanita itu menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilihnya baik suami mereka yang telah menceraikannya maupun pria lain yang ingin dikawininya dan bakal menjadi suami-suami mereka, maka itu adalah haknya secara penuh karena janda berhak atas dirinya daripada yang lain.¹⁵

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h.69.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.38.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an, Juz I* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.501.

Ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.¹⁶

Dan ayat lain yang menunjukkan tentang wali nikah dalam firman Allah swt: al-Baqarah/2 : 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ كَافِرَةٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin telah baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”¹⁷

Ayat di sini mengandung pengertian bahwa para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi:

Pertama penggalan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada berpendapat yang sangat ketak, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersipat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami bagi putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekedar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya.

¹⁶Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Mujtahid, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr),h.366.

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.36.

Menurut penganut pandangan ini tuntutan tersebut pun serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.¹⁸

Kedua larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama dapat merumuskan *ahl al-kitab* dalam kelompok dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* untuk mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut menurut ayat di atas berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitab* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. maka bagi para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik dan juga *ahl al-kitab*.¹⁹

Selain itu dijelaskan juga dalam firman Allah swt: QS. an-Nur/24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”²⁰

Ibarat nash ketiga ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama merupakan larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an, Juz I* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.475.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Juz I*, h.476.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.355.

dengan laki-laki musyrik sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *kithab* Allah berkenan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada wali keharusan adanya wali dalam perkawinan.²¹

Dari pembahasan ketiga ayat tersebut di atas, Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.²²

Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah yaitu:

- a. Allah swt berfirman: QS. al-Baqarah/2 : 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

Terjemahnya:

“Dan bila kamu telah mentalak istri-istrimu dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”²³

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.70.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h.72.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.38.

b. Allah swt berfirman: QS. al-Baqarah/2 : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ²⁴

Terjemahnya:

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain.”²⁴

c. Allah swt berfirman: QS. al-Baqarah/2 : 234.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁵

Terjemahnya:

“Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.”²⁵

Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas mengatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.²⁶

²⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.37.

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.39.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.72.

Pendapat Hazairin yang dikutip oleh Sayuti Thalib menerangkan bahwa memang wali tidak menjadi syarat bahwa sahnya perkawinan orang perempuan yang telah dewasa.²⁷

Jumhur ulama disamping menggunakan ayat-ayat diatas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, mereka mengutkan pendapatnyaitu dengan serangkaian hadis di bawah ini:

- a. Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis bunyinya:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" (رواه أحمد)

Artinya:

“Dari Abu Burdah bin Abi Musa ra. Berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Tidak boleh nikah tanpa wali.” (HR. Ahmad)

- b. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasai:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". (رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra., berkata: Rasulullah saw., pernah bersabda: “Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”

²⁷Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. Ke-V; Jakarta: UII Press, 1986), h.64

c. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسُهَا"

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga telah boleh mengawinkan dirinya sendiri."

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis pertama di atas dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti:

Pertama: tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua: bila kata itu tidak diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama Sunni, seperti ulama Jumhur, juga mewajibkan adanya wali.²⁸

Sedangkan terhadap hadis yang kedua ulama Sunni dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali, bukan mengawinkannya hanyalah wali. Hadis yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.73.

Di samping pembelaan Sunni terhadap hadis-hadis yang dikemukakan Jumhur ulama, ulama Sunni juga mengemukakan hadis Nabi yang mengandung pendapatnya. Di antaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat muslim yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya”.

Juga hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, dan al-Nasai dan disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ". (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”

Dua hadis tersebut di atas digunakan oleh ulama Hanafiyah dan pengikutnya untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tersebut sebelumnya untuk menetapkan tidak wajibnya bila wali yang melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal.

D. *Macam-Macam Wali Nikah*

Bagi fuqoha yang memegangi keharusan adanya wali dalam perkwinan, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu:²⁹

1. Wali nasab (keturunan), yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.
2. Wali *mut'hiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
3. Wali hakim atau wali sulthan, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terhadap beda pendapat dikalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama terdiri dari Syafi'iyah, Hanafiyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat atau *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakharusan meminta pendapat anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.75.

mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua: wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah atau kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama Jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- c. Anak saudara laki-laki sekandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- h. Anak paman seayah.
- i. Ahli waris kerabat lainnya.

Ulama Hanafi seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak sebagai wali nasab, termasuk *zawl arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang

masih kecil atau tidak sehat akalnya. (Ibnu al-Humam: 285) berbeda dengan pendapat Jumhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan menikah.

Ulama Maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari pada ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak *ijbar* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali *aqrab*.



BAB IV

BEDA AGAMA DALAM PERWALIAN MAZHAB SUNNI DAN SYI'AH

A. Perwalian Beda Agama

Dalam masalah perwakilan, hukum Islam sudah jelas memerintahkan kepada siapa saja yang memang sudah layak untuk menikah. Maka dipersilahkan untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw, tentunya sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Mayoritas ulama menyepakati, termasuk didalam ulama empat madzhab, bahwa haram menikahi perempuan bukan muslimah selain ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Keharaman menikahi perempuan bukan muslimah selain ahli kitab itu berdasarkan QS. al-Baqarah: 221, dan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab itu didasarkan kepada QS. al-Maidah ayat ke-5. Dalam bahasa lainnya bahwa menurut mayoritas ulama boleh menikahi perempuan ahli kitab, walaupun status kebolehannya juga berkisar antara mubah dan makruh.

Menurut jumhur ulama (Sunni dan Syi'ah), bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagaimana yang telah disebutkan kecuali hakim. Hanya saja dalam Syi'ah pernikahan memiliki dua bentuk: nikah mutlak dan nikah mut'ah. Nikah mutlak seperti yang kita kenal di sini selama ini. Nikah mut'ah ialah pernikahan yang disepakati pada masa tertentu sehingga otomatis pernikahan itu terhenti bila tidak diperpanjang.

Namun demikian sebuah pernikahan tidak begitu saja mudah dilakukan diperlukan adanya syarat dan hukum nikah yang harus dilengkapi oleh yang menjalankan pernikahan, seperti adanya wali dan lain-lain. Meskipun permasalahan wali sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama atau terlepas dari permasalahan harus ada atau tidaknya wali dalam sebuah pernikahan, pada bagian tulisan ini penulis menyatakan diperlukan adanya wali. Kesimpulan ini diambil setelah melihat dan mengkaji secara seksama perlu atau tidaknya wali, timbul permasalahan lain lagi yaitu, bagaimana jika wali yang menikahkan itu berbeda agama? Pada bagian ini akan dibahas siapa yang berhak mewalikannya. Bisa saja wanita muslimah sedang wali yang menikahkannya non-muslim, atau wanita itu non-muslim sedang wali yang menikahkannya adalah muslim. Lebih jelas permasalahan itu akan dibahas sebagai berikut:

1. Wanita muslimah sedang wali yang berhak menikahkannya adalah kafir

Wali bagi perempuan muslimah itu tidak boleh orang kafir. Allah swt berfirman: QS. at-Taubah/9 : 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”¹

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.191.

Berdasarkan ayat tersebut, orang kafir tidak boleh menjadi wali wanita muslimah sebab orang kafir tidaklah membantu bagi wanita muslimah, karena perbedaan agama. Oleh karena itu, wanita muslimah ketika akan menikah sedangkan walinya non-muslim maka ia bisa mengangkat walinya dengan cara memberi kuasa kepada seseorang yang adil meskipun bukan mujtahid untuk dijadikan walinya, demikian pendapat imam Syafi'i.²

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman: QS. al-Baqarah/2 : 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”³

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para wali. Para wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Tegasnya, para wali dilarang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, para wali juga dilarang menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa orang kafir tidaklah sah menjadi wali bagi wanita muslimah yang hendak menikah. Namun ia bisa menguasai perwaliannya itu kepada siapa saja asalkan harus adil, setelah menari dan berusaha menari barangkali diantara keluarganya ada yang muslim. Kalau memang ada maka yang berhak mewakilkannya adalah saudara yang memang muslim berdasarkan tartibul

²al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr,) Juz ,1h.49

³Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.36.

wali yang sudah diwariskan. Jika pada akhirnya saudaranya tidak ada satupun yang muslim maka permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga perkawinan yaitu pejabat dan kantor urusan agama (KUA), yang akan menjadi wali baginya.

2. Wanita non muslim sedang wali yang berhak mewalikannya adalah muslim.

Maka wali yang muslim ini tidak boleh menjadi wali perempuan kafir. Allah swt berfirman: QS. al-Maidah/5 : 51.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang Islam tidak boleh menjadi wali perempuan kafir. Ayat tersebut menyatakan Allah memutuskan tindakan saling membantu diantara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir inilah pendapat yang kuat. Bahkan ditegaskan bahwa orang kafir hanya boleh menjadi wali untuk perempuan yang kafir.⁵

⁴Deparemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 118.

⁵al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Dar Al-Fikr,) Juz ,1h.49

Orang kafir pun menjadi perempuan kafir harus adil dalam agamanya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan haram. ditegaskan oleh Rafi'i "tidaklah orang kafir yang berbuat haram menikahkan perempuan kafir, kalau dilakukan hal tersebut, sama saja dengan seorang muslim yang fisik menikahkan anak perempuannya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa wanita kafir tidak boleh diwalikan oleh orang muslim. Karena orang kafir bukan merupakan pembantu orang muslim. Orang kafir hanya dapat diwalikan oleh orang kafir sendiri, secara kebetulan dalam pernikahan menurut orang kafir wali bukanlah suatu yang harus ada dalam pernikahan sehingga keberadaan wali terasa tidaklah penting, seandainya ada maka orang kafir tersebut juga harus orang yang adil. Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa perwalian beda agama tidak boleh atau haram hukumnya.

Mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab ulama juga mengalami perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan:

a. Pendapat yang membolehkan

Menurut pendapat jumruhl ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab yang berada dalam lindungan negara Islam atau disebut dengan kafir.

b. Menurut pendapat yang haram

Menurut golongan syi'ah Imamiah dan syi'ah Zaidiyah mereka berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab.

B. Imlementasi Pernikahan dengan Wali Beda Agama dalam Kehidupan Kontemporer

Pada dasarnya pernikahan (munakahat) bersifat suci dan bertujuan untuk menghindari fitnah didalam masyarakat apabila antara dua orang yang bukan muhrim bercampur sehingga terjadi keterikatan antara dua belah pihak. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing itu memiliki syarat-syarat tertentu.⁶

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat sebagai berikut ;

1. Adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali bagi calon perempuan
3. Dua orang saksi
4. Mahar (mas kawin)
5. Ijab kabul

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara di kehidupan masyarakat perkawinan atas dasar cinta tanpa didasari satu agama sering kali dijumpai. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan dari segi hukum misalnya mengenai keabsahan perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam Undang-

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h.71.

Undang tersebut berdampak pada keseimbangan masyarakat akan keabsahan perkawinan beda agama yang akan berakibat pula dengan kesulitan dalam prosedur pelaksanaannya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), semua hal yang berkaitan dengan perkawinan akan terikat langsung dengan hukum dan ketentuan dalam undang-undang ini. Pengaturan dalam undang-undang ini melingkupi banyak hal mengenai perkawinan, mulai dari persyaratan perkawinan, hak kewajiban suami istri, hal yang dilarang dalam perkawinan sampai dengan proses perceraian semua ada di dalam isi perundang – undangan ini.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan akan dinilai sah jika perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya dari pasangan tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan harus tunduk pada aturan perkawinan agamanya dan tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan keyakinan. Jika sebuah perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum agama yang dianut pasangan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak sah. Setiap agama memiliki perbedaan mengenai aturan perkawinan yaitu pada prosesi upacara dan persyaratan perkawinan, contoh dalam agama Islam dengan melaksanakan rukun nikah atau *ijab qobul* sedangkan dalam agama Kristen melaksanakan pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh pendeta atau pastur.

Sahnya perkawinan dari sudut pandang agama perlu disahkan pula oleh negara. Pengesahan negara ditujukan dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan agar peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau masyarakat. Pencatatan perkawinan dicatatkan dalam surat yang bersifat resmi berupa akta dan dapat dipergunakan bila diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Agar terikat dengan akibat hukum dalam perkawinan yang diakui negara yaitu dengan dicatatkan oleh lembaga

pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang memeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang memeluk agama lain di luar agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Polemik akan muncul dalam proses pencatatan perkawinan jika terjadi suatu permasalahan yang tidak diatur atau bahkan dilarang dalam Undang- Undang Perkawinan. Peristiwa ini terjadi pada permasalahan perkawinan beda agama yang terjadi di Surakarta. Pasangan Listyani Astuti yang beragama Kristen dan Achmad Julianto yang beragama Islam berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap memegang teguh agama masing-masing. Permasalahan timbul atas penolakan Kantor Catatan Sipil Surakarta dalam mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan bahwa pasangan tersebut mempunyai keyakinan berbeda dan masih tetap berpegang teguh pada masing-masing agamanya. Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk menolak pencatatan perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Kantor Catatan Sipil beranggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demikian juga agama masing-masing pemohon yang tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan tersebut setelah mendapatkan putusan hakim atas permohonan izin perkawinan beda agama.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang

lainnya. Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Dari putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

GHR juga mengatur mengenai Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken, S. 1898 No.158). Namun demikian, HOCI telah dicabut oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui Pasal 106. Sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pertimbangan hakim juga dikarenakan dalam hukum positif di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu agama sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986). Adanya perkawinan beda agama

yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atas penetapan pengadilan, maka keabsahan perkawinan secara negara dapat disamakan kedudukan hukumnya dengan perkawinan dengan pasangan seagama. Keabsahan perkawinan dapat juga mencakup hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk rumah tangga.

Dalam dunia dewasa ini, orang tidak lagi melihat kepada agama melainkan kepada rasa yang ada. Maraknya pernikahan beda agama sering di *booming* kan oleh artis yang menjadi sentral focus dalam media massa yang mempengaruhi tindak tanduk masyarakat sekitarnya. Hal ini juga berimbas kepada wali sebagai saksi kunci dalam pernikahan. Pernikahan dari hari ke hari semakin menunjukkan kesakralannya dengan melihat kepada wali yang dijadikan patokan hukum keabsahan pernikahan. Masyarakat pun semakin gerah melihat kondisi yang ada. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pernikahan beda agama yang dipahami masyarakat membuat suatu konklusi baru bahwa persoalan wali beda agama pun tidak jauh beda dengannya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pernikahan beda agama yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. *KESIMPULAN*

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (kesimpulan jawaban dari rumusan masalah)

1. wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.
2. Menurut Ulama Sunni bahwa Wali tidak berhak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Atau orang Islam tidak boleh menjadi wali perempuan kafir.
3. Sistem perwalian beda agama dalam aliran syi'ah dengan melihat pendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab, berarti membolehkan dari sisi perwalian beda agama.
4. Implementasi pernikahan dengan wali beda agama pada kehidupan kontemporer semakin memperlihatkan keunikannya dengan beragam penafsiran yang terjadi dan membuahkan konklusi berbeda. Pada kenyataanya, semakin banyak dan maraknya pernikahan beda agama yang terjadi berarti wali pun tak jadi soal.

B. SARAN

Keberadaan seorang wali sangat berguna pada saat melaksanakan pernikahan ketika putrinya seorang muslimah dan ayahnya seorang non muslim. Jadi yang berhak menjadi wali disini adalah wali hakim.

Permasalahan pernikahan perlu dimasukkan dalam kurikulum fiqh pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan permasalahan wali dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan forum atau pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian Islam dan ceramah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad. "Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam", *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin. *Fiqh Munakahati I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abd Kadir. *Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data*. Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, Makassar: t.p, 2012.
- al-Husaini, al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Dar Al-Fikr.
- al-khin, Musthofa. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim, Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002.
- al-Kusnawi, Abu Bakar bin Hasan. *Ashal al-Madarik, jilid I*, Beirut: Daar al-Fikr, 1996.
- al-Maududi Fazl Ahmed, Abul Ala. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Daru Ulum Fress, 1983.
- al-Zuhaly, Wahbah. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 1409 H / 1989 M, Beirut: Libanon: Darul Fikr Jil.VII.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Bakker, Anton. *Metode filsafat*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo, Topik-topik Pemikiran Aktua, Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah dan Kuliah Subuh, Qolbun Salim, 2006.
- Basyir, Ahmad Ashar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Binjai, Syeihk H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkan* (Jakarta: kencana, 2006.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

- Fauzi, Muhammad. *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, Selangor: synergmat, 2003.
- Frista Armanda W, *Kams Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lintas Media.
- Gazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahri Trading: 1975.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*.
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kia Atas Wacana Agama dan Gende*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Ibnu Rusyd, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Juri, Mohammad. "Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: 1985.
- Ma'laf, Louis. *Kamus Al-munjid*. Bairut: Dar al-Musyrik, 1975.
- Masyuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mugniayah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Al-Usrah Wa-Ahkamuha Fi- al- Tasyri'i al-Islami, Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, terjemahnya Abdul Mujid Khon, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 poin 2.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Rauf, Abdul Hasan. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1982.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II* (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 2010
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an, Juz I* (Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Siddiq, Abdullah. *Harian Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Tintamas, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukardja, Bakri A. Rahman dan Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna' Fi Hilli al-Alfad Abi Saju*, Bandung: Daar al-Ikhya' al-Kutubiyah al-Alamiyyah, t.th., Juz II.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Thami, H. M. A dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkaf*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **NAHARIA**, Lahir di Pambusuang pada tanggal 15 Juni 1992, tempat tinggal di Pambusuang, Kelurahan Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Dan anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan **BAKRI** dan **NURMADIAN**. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SD Negeri 2 006 Pambusuang (1999-2005), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pambusuang (2005-2008). Setelah itu penulis lanjut di SMK Negeri Labuang (2008-2011), lalu berlabuh di kampus peradaban dan lulus pada jurusan Perbandingan Hukum UIN Alauddin Makassar (2011-2015). Selama di kampus penulis pernah menjadi pengurus HMJ Perbandingan Mazhab dan Hukum periode (2011-2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R